

Pendampingan Organisasi Pokgiat LPMK untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif

Sarjita¹, Edi Cahyono², Taqdirul Alim³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa

^{1,2}Program Studi Manajemen

³Program Studi Manajemen Retail

Email : edicahyono@stibsa.ac.id

Abstrak

Organisasi Pokgiat LPMK memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat padukuhan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan kelembagaan, seperti lemahnya koordinasi organisasi, rendahnya kapasitas manajerial pengurus, serta belum optimalnya tata kelola organisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat organisasi Pokgiat LPMK melalui pendampingan tata kelola organisasi agar mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara efektif. Metode pelaksanaan abdimas meliputi identifikasi masalah, pelatihan manajemen organisasi, pendampingan penyusunan tata kelola, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus Pokgiat LPMK terhadap prinsip tata kelola organisasi yang efektif, meningkatnya kapasitas pengurus dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta terbentuknya pola kerja organisasi yang lebih terstruktur. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Kata kunci : Pendampingan, Tata Kelola Organisasi, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

The LPMK (Lembaga Masyarakat Pembinaan LPMK) Pokgiat organization plays a strategic role in supporting community empowerment at the hamlet level. However, in practice, various institutional issues remain, such as weak organizational coordination, low managerial capacity of administrators, and suboptimal organizational governance. This community service activity aims to strengthen the LPMK Pokgiat organization through mentoring on organizational governance, enabling it to effectively carry out its community empowerment function. The community service implementation method includes problem identification, organizational management training, mentoring on governance development, and activity evaluation. The results of the activity indicate an increased understanding of the LPMK Pokgiat administrators regarding the principles of effective organizational governance, increased capacity in program planning and implementation, and the establishment of a more structured organizational work pattern. This activity makes a significant contribution to supporting the sustainability of community empowerment programs at the village level.

Keywords : Mentoring, Organizational Governance, Community Empowerment

1. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berbasis partisipasi. Dalam konteks pemerintahan lokal, keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi masyarakat sebagai mitra pemerintah. Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa tata kelola organisasi yang baik menjadi prasyarat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Di tingkat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki peran strategis dalam menampung aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Pokgiatan LPMK sebagai unit kegiatan operasional memiliki fungsi langsung dalam implementasi program pemberdayaan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sering menghadapi persoalan kelembagaan, seperti lemahnya struktur organisasi, koordinasi yang tidak efektif, dan keterbatasan kapasitas manajerial (Sutarto, 2020; Mardikanto & Soebiato, 2021).

Suharto (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan agar masyarakat mampu mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan organisasi masyarakat menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan pendampingan kelembagaan Pokgiatan LPMK yang berfokus pada penguatan tata kelola organisasi secara partisipatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kementerian Dalam Negeri RI, 2021) serta didukung oleh temuan empiris mengenai pentingnya reformasi tata kelola organisasi komunitas (Setyowati & Prasojo, 2022). Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, hasil, dan dampak pendampingan organisasi Pokgiatan LPMK dalam mewujudkan tata kelola pemberdayaan masyarakat yang efektif.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan

Dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pengurus Pokgiatan LPMK untuk menggali permasalahan tata kelola organisasi.

2. Pelatihan Manajemen Organisasi

Pemberian materi mengenai prinsip tata kelola organisasi, kepemimpinan, perencanaan program, dan koordinasi organisasi.

3. Pendampingan Penyusunan Tata Kelola

Pendampingan dalam penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme kerja, dan perencanaan program kerja.

4. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk menilai perubahan kapasitas organisasi dan efektivitas pendampingan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus Pokgiatan LPMK mengenai pentingnya tata kelola organisasi yang efektif. Pengurus mampu menyusun struktur organisasi yang lebih jelas, menetapkan pembagian tugas, serta merencanakan program kerja secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan pandangan Nasution dan Lubis (2021) yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan organisasi juga mendorong peningkatan koordinasi dan komunikasi antaranggota Pokgiatan LPMK. Reformasi tata kelola organisasi komunitas melalui

pendampingan terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan (Setyowati & Prasojo, 2022).



Gambar 1 Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kebaruan hasil abdimas ini tercermin dari perubahan pola kerja organisasi yang sebelumnya bersifat informal menjadi lebih terstruktur dan kolektif. Hal ini mendukung pendapat Mardikanto dan Soebiato (2021) bahwa pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan harus ditopang oleh kelembagaan yang kuat dan dikelola secara profesional.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan organisasi Pokgiat LPMK berhasil meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi. Pendekatan pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan terbukti efektif dalam mendukung peran Pokgiat LPMK sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Program ini berpotensi direplikasi pada kelurahan lain dengan karakteristik serupa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pengurus Pokgiat LPMK dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Jakarta: Kemendagri.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Nasution, Z., & Lubis, M. (2021). Community Empowerment through Institutional Strengthening. *International Journal of Community Development*, 5(1), 44–52.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Organizational Behavior*. Pearson Education.
- Setyowati, E., & Prasojo, E. (2022). Governance Reform in Local Community Organizations. *Journal of Public Administration Studies*, 7(2), 85–96.
- Suharto, E. (2020). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutarto. (2020). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wibowo. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.